

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Pertanggung jawaban tersebut tidak cukup laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggung jawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (www.djpk.kemenkeu.go.id). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Keuangan daerah yang baik dalam suatu pemerintahan bisa dilihat dari bagaimana laporan keuangan disajikan, untuk menilai laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi, 2016: 133)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. (2017: 91)

Dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien, untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bandung yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung. DPMPTSP Kota Bandung tentu saja memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan untuk menunjukkan seberapa efisien dan efektifitas dalam menjalankan pemerintahan dalam satu daerah.

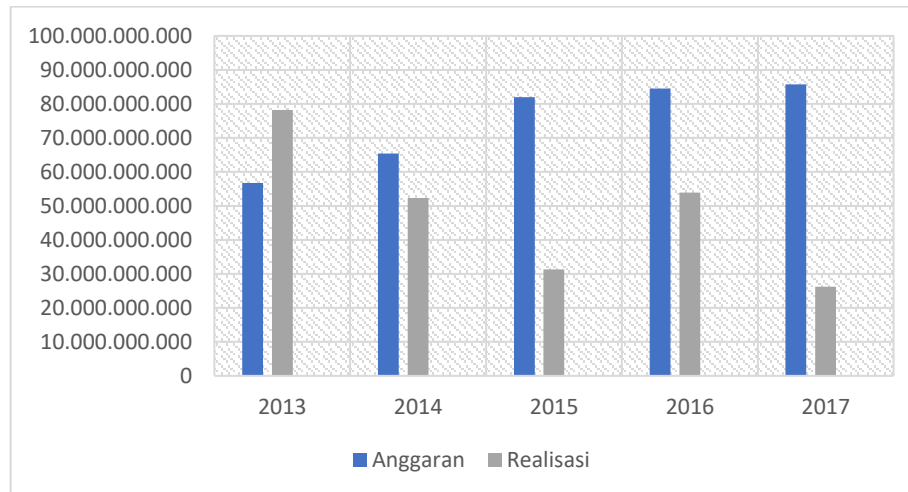
Untuk memberikan ilustrasi analisis rasio keuangan, berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah yang diambil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran (Dalam Rupiah Rp)	Realisasi (Dalam Rupiah Rp)
2013	56.770.000.000	78.178.299.725
2014	65.360.026.267	52.330.616.242
2015	82.000.000.000	31.301.966.107
2016	84.564.205.000	53.927.406.864
2017	85.776.205.000	26.189.568.780

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bandung, Data Diolah Peneliti, 2018.

Grafik 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kota Bandung
Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bandung, Data Diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 dan grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kota Bandung tahun 2013-2017 mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya, pada tahun 2013 pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi dari yang dianggarkan. Sedangkan, dari 2014-2017 tidak mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung dari tahun anggaran 2014-2017 secara berturut-turut pendapatan daerah tidak mencapai target yang dianggarkan.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD dengan cara menghitung rasio keuangan yang meliputi Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam menetapkan hal-hal diatas dengan menyebutnya melalui judul skripsi “*Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017.*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan mengidentifikasi masalah yaitu *Realisasi Anggaran Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2014-2017 masih tergolong rendah karena belum mencapai target yang dianggarkan.*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017?
2. Bagaimana tingkat rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah DPMPTSP Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017.

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pendapatan asli daerah DPMPTSP Kota Bandung tahun anggaran 2013-2017.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menggolongkan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya mengenai kinerja DPMPTSP Kota Bandung ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada DPMPTSP Kota Bandung.

c. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingann dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi diartikan sebagai proses pengorganisasian sumber-sumber, sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut S. P. Siagian dalam Pasolong (2014: 3), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yangtelah di tentukan sebelumnya. Perkembangan administrasi sebagai ilmu ditandai dengan lahirnya beragam kajian administrasi, salah satunya yaitu Administrasi Publik.

Chandler dan Plano dalam Pasolong, (2013: 7) mendefinisikan administrasi publik adalah seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

Administrasi sebagai ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik merupakan suatu proses dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan di berbagai bidang secara efisien. Salah satu bidang dalam memecahkan permasalahan administrasi publik yaitu dalam bidang keuangan. Keuangan mempunyai ruang lingkup yang luas seperti keuangan negara dan daerah. Di mana permasalahan keuangan biasanya terjadi dalam proses pengadministrasian keuangan negara ataupun daerah.

Menurut Syamsi dalam Anggara (2016: 26) Administrasi keuangan negara adalah kegiatan penataan kerja sama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan. Pengadministrasian tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara atau pemerintah yang bersangkutan di bidang keuangan.

Administrasi keuangan negara merupakan suatu proses atau tahapan-tahapan rangkaian aktivitas penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dalam penggunaan uang pada keuangan daerah ataupun negara.

Menurut Dadang Suwanda (2013: 45) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Untuk mengelola suatu keuangan daerah diperlukannya tahapan kebijakan salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pula.

Menurut Dadang Suwanda (2015: 66) Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk melihat bagaimana laporan keuangan disajikan dengan baik bisa dilakukan dengan cara menganalisis suatu laporan keuangan tersebut, dengan analisis bisa diketahui posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan.

Menurut Mahmudi (2016: 141) Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

1.7 Proposisi

1. Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung akan Efektif jika pencapaian realisasi penerimaan melebihi dari target penerimaan.
2. Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung akan efisien jika realisasi penerimaan melebihi dari biaya pemerolehan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG